

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Orde Baru, arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia ditetapkan dalam kerangka pembangunan nasional yang menekankan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan ideologi Pancasila. Pemerintah memandang pendidikan sebagai sarana strategis untuk membentuk sumber daya manusia yang disiplin, produktif, dan loyal terhadap negara. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana pembinaan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan nasional yang harus mendukung ideologi negara dan kebijakan politik Orde Baru. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menerapkan sistem sentralisasi pendidikan, di mana seluruh lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan pesantren, ditempatkan di bawah pengawasan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah ini dimaksudkan agar pelaksanaan pendidikan Islam berjalan searah dengan visi pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹

Kebijakan tersebut menandai perubahan besar terhadap sistem pendidikan Islam yang sebelumnya bersifat otonom dan tradisional. Pada tahun 1975, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Menteri Dalam

¹ Khotib, Amril M, "Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pemerintahan Orde Baru," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, vol. 4, No.2, 2025.

Negeri, Menteri Agama, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.² Melalui SKB ini, pemerintah menetapkan bahwa madrasah wajib memasukkan mata pelajaran umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan ke dalam kurikulumnya.³ Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh prinsip bahwa peserta didik madrasah, sebagaimana warga negara Indonesia lainnya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui keputusan tersebut, lulusan madrasah diharapkan memiliki kesempatan yang setara dengan lulusan sekolah umum untuk melanjutkan pendidikan atau berpindah ke lembaga pendidikan umum, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.⁴

Masa Orde Baru juga memberikan ruang bagi organisasi-organisasi Islam besar (ORMAS) seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk berperan dalam menjaga dan mengembangkan pendidikan Islam, meskipun dalam batasan kebijakan pemerintah. Kedua organisasi ini berupaya mempertahankan nilai-nilai keislaman melalui penguatan kurikulum, pendirian lembaga pendidikan formal, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Seperti Nahdlatul Ulama mengembangkan madrasah dan pesantren dengan pola pendidikan yang tetap menonjolkan tradisi keilmuan Islam

² Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, 3 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 181.

³ Khoirunnisaa Sholihah Luthfi Alya' & al., "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia," *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol. 9, No. 4 (2021).

⁴ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, 3 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 181.

klasik namun disesuaikan dengan tuntutan kurikulum nasional. Muhammadiyah mengembangkan sistem sekolah modern dengan menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sekaligus memperkuat karakter keislaman peserta didik. Kedua organisasi tersebut juga melakukan dialog dan kerja sama dengan pemerintah agar pendidikan Islam dapat berjalan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, tanpa kehilangan identitas keagamaan yang menjadi ciri khasnya.⁵

Salah satu madrasah di Kabupaten Mojokerto yaitu Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin, merupakan madrasah yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam tradisional seperti pesantren dan pendidikan formal dalam kegiatan belajarnya. Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin berada di Dusun Blendren Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin sebelumnya merupakan sebuah pondok pesantren yang kemudian bertransformasi menjadi Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin secara formal. Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin dibuktikan dengan piagam pengakuan Madrasah yang diterbitkan pada tahun 1975.⁶ Transformasi dari pondok pesantren menjadi madrasah formal tersebut tidak sekadar perubahan bentuk kelembagaan, melainkan juga merupakan strategi adaptasi dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai tradisional Islam.⁷

⁵ Heni Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru," *Jurnal Tarbiya: Ilmu Pendidikan Islam* Vol. 1, No. 1 (2015).

⁶ Wawancara dengan bapak Anwar selaku kepala sekolah madrasah Amiruddin sekarang, 23 Desember 2024, di rumah bapak Anwar.

⁷ *Ibid.*

Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin menerapkan dua sistem pembelajaran khas pesantren tradisional, yaitu bandongan dan sorogan.⁸ Sistem bandongan dilaksanakan dengan cara guru atau kiai membaca dan menjelaskan kitab kuning sementara para santri menyimak, mencatat makna (maknani) pada teks, dan mengikuti penjelasan tanpa interaksi individual yang intens. Model ini memungkinkan penyampaian materi secara lebih luas dan cepat karena satu guru dapat mengajarkan kitab kepada para santri sekaligus. Sementara itu, sistem sorogan dilakukan secara individual, yaitu setiap santri membawa kitabnya sendiri dan membacakan teks di hadapan guru untuk diperiksa, dikoreksi, dan dibimbing langsung. Melalui metode sorogan, santri dilatih untuk memiliki ketelitian, kemandirian belajar, serta kemampuan membaca dan memahami teks Arab secara mendalam.⁹

Kedua metode tersebut kemudian diadaptasi oleh Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin karena dinilai relevan dengan tradisi keagamaan masyarakat setempat yang masih kuat terhubung dengan kultur pesantren. Dengan demikian, penerapan bandongan dan sorogan menjadikan madrasah ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai ruang pelestarian nilai-nilai Islam tradisional yang telah lama hidup dalam lingkungan sosial masyarakat.¹⁰

⁸ Wawancara dengan bapak Musthofa salah satu murid yang dulunya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin, 5 Oktober 2025, di rumah bapak Musthofa.

⁹ M. Sholeh, "Model Pembelajaran Tradisional di Pesantren: Kajian atas Sistem Bandongan dan Relevansinya terhadap Pendidikan Modern," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2020): 87–99; Ahmad Saifuddin, "Metode Sorogan dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 3, no. 1 (2018): 56–67.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Musthofa salah satu murid yang dulunya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin, 5 Oktober 2025, di rumah bapak Musthofa.

Melalui pendekatan tersebut, Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin berupaya menjaga kontinuitas warisan pendidikan pesantren sambil memenuhi tuntutan kebijakan nasional yang menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Memasuki tahun 1968, perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal mendorong Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin untuk mentransformasikan pola pembelajaran tradisional menuju sistem pendidikan yang lebih terstruktur dengan mengadopsi kurikulum formal dari Kementerian Agama.¹¹

Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin tetap menempatkan kedisiplinan, dan keikhlasan sebagai fondasi utama dalam proses pendidikan. Guru berperan tidak sekadar sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual yang menanamkan nilai keislaman melalui keteladanan sehari-hari. Dengan demikian, proses pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian Islami yang berakar pada nilai-nilai tradisional pesantren.¹²

Penelitian ini menjadi penting karena mengangkat realitas lembaga pendidikan Islam yang berjuang menjaga warisan nilai tradisional dalam arus sistem pendidikan nasional yang seragam. Madrasah Ibtidaiyah Amiruddin Mojokerto: Sejarah Perkembangan Dan Pembelajaran 1968-1985 memperlihatkan dinamika internal dan

¹¹ Wawancara dengan bapak Bashori Alwi selaku keluarga dari keturunan mbah Amiruddin, 20 Juni 2025, di rumah bapak Bashori Alwi

¹² *Ibid.*

eksternal dalam proses transformasi Madrasah, serta peran penting komunitas dan keluarga dalam mempertahankan identitas keagamaan lembaga pendidikan lokal.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas, fokus yang terstruktur, serta mempermudah pencapaian tujuan penelitian secara sistematis dan mendalam. Dengan adanya rumusan masalah yang tepat, diharapkan hasil penelitian dapat disajikan secara komprehensif dan bermanfaat, khususnya bagi pengembangan kajian sejarah pendidikan Islam dan kontribusinya dalam masyarakat lokal. Adapun permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimana latar belakang berdirinya Madrasah Amiruddin di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto? Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang berdirinya Madrasah Amiruddin, termasuk peran tokoh para pendiri, faktor-faktor sosial dan keagamaan yang melatarbelakanginya. *Kedua*, bagaimana perkembangan Madrasah Ibtidaiah Amiruddin dari tahun 1968-1985? Rumusan masalah kedua untuk mengetahui proses bagaimana Madrasah Ibtidaiah Amiruddin berkembang, yang dulunya sempat mengalami penurunan dalam menjalankan lembaga pendidikan Islam.

C. Metode Penelitian

Penelitian tentang Madrasah Ibtidaiah Amiruddin Mojokerto: Sejarah Perkembangan Dan Pembelajaran 1968-1985 menggunakan metode penelitian

sejarah. Menurut Kuntowijoyo terdapat empat tahapan penelitian sejarah, yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi yang dijelaskan sebagai berikut:

Pertama heuristik, heuristik merupakan tahap di mana peneliti melakukan pencarian, pengumpulan, dan inventarisasi sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Kuntowijoyo, tahap heuristik menjadi fondasi utama karena kualitas penelitian sejarah sangat ditentukan oleh sejauh mana peneliti mampu menemukan sumber yang autentik dan relevan.¹³ Kuntowijoyo menekankan bahwa sumber primer harus menjadi prioritas utama dalam penelitian sejarah karena memberikan informasi langsung dari masa yang diteliti, sedangkan sumber sekunder hanya digunakan sebagai pelengkap atau pembanding. Tahap heuristik juga memerlukan kemampuan peneliti dalam menyeleksi dan mendokumentasikan sumber secara sistematis agar memudahkan proses kritik dan interpretasi di tahap selanjutnya.¹⁴

Penelitian mengenai *Madrasah Ibtidaiah Amiruddin*, tahap heuristik dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber seperti: arsip madrasah, dokumen kelembagaan, surat keputusan, hingga wawancara dengan tokoh-tokoh seperti Bapak Anwar selaku kepala sekolah sekarang, Bapak Mas'ud selaku kepala yayasan sekarang, Bapak Bashori Alwi salah satu keturunan Mbah Amiruddin, Bapak Musthofa salah satu guru yang dulunya merupakan seorang murid.

¹³ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, hlm. 94.

¹⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 25.

Tahap kedua verifikasi, yaitu proses penilaian terhadap keaslian (autentisitas) dan keabsahan isi (kredibilitas) sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Kuntowijoyo menyebut tahap ini sebagai *kritik sumber sejarah*, yang berfungsi untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar dapat dipercaya dan bukan hasil manipulasi atau kesalahan interpretasi.¹⁵ Verifikasi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai keaslian sumber dari aspek fisik dan asal-usulnya, misalnya meneliti tahun pembuatan, penulis, tempat asal, jenis kertas, tinta, dan kondisi dokumen.¹⁶ Tujuannya adalah memastikan bahwa sumber tersebut benar-benar berasal dari periode yang sesuai dengan penelitian. Sementara itu, kritik internal berfokus pada isi sumber, yaitu menilai kebenaran, logika, dan keandalan informasi yang terkandung di dalamnya.¹⁷

penelitian tentang Madrasah Amiruddin, verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber, seperti kesaksian lisan para tokoh yang masih hidup dengan dokumen resmi madrasah dan catatan pemerintah daerah. Sebagai contoh, keterangan lisan dari salah satu tokoh keluarga pendiri yang menyebutkan bahwa Madrasah Amiruddin mulai beroperasi secara formal pada tahun 1968 diverifikasi dengan mencocokkannya pada arsip buku induk madrasah, surat keterangan pendirian lembaga. Perbedaan atau ketidaksamaan informasi antara sumber lisan dan sumber tertulis dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan konteks waktu, latar belakang narasumber, serta kemungkinan keterbatasan ingatan.

¹⁵ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, hlm. 97.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 98.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 99.

Melalui proses ini, peneliti dapat menghindari bias ingatan, kesalahan tafsir, atau subjektivitas narasumber. Kuntowijoyo menegaskan bahwa tanpa tahap verifikasi, penelitian sejarah akan kehilangan validitas ilmiahnya karena kebenaran data yang digunakan tidak dapat dipastikan secara ilmiah.¹⁸

Tahap ketiga interpretasi, yaitu proses menafsirkan dan memberikan makna terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi.¹⁹ Tahap ini bersifat analitis dan sintesis, di mana peneliti tidak hanya menguraikan data, tetapi juga menghubungkan fakta-fakta tersebut dalam kerangka kausalitas untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dari peristiwa yang terjadi.²⁰ Menurut Kuntowijoyo, interpretasi merupakan kegiatan berpikir kritis yang menuntut kemampuan analisis tinggi. Peneliti sejarah tidak boleh sekadar menyalin fakta, tetapi harus memahami konteks sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa.²¹ Dalam hal ini, peneliti juga perlu menghindari interpretasi spekulatif yang tidak didukung oleh bukti empiris.²²

Dalam konteks penelitian ini, tahap interpretasi digunakan untuk memahami bagaimana sejarah berdirinya dan bagaimana perkembangan sistem pendidikan di Madrasah Ibtidaiah Amiruddin tahun 1968-1985. Fakta-fakta sejarah yang ditemukan dihubungkan dengan konteks sosial masyarakat sekitar, perubahan kebijakan

¹⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, hlm. 101.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 103.

²⁰ *Ibid*, hlm. 104.

²¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 27.

²² *Ibid*, hlm. 28.

pendidikan nasional, serta pengaruh kultur pesantren yang menjadi akar tradisi lembaga tersebut.

Tahap keempat historiografi, adalah penyusunan dan penulisan hasil penelitian sejarah dalam bentuk karya ilmiah. Tahap ini merupakan puncak dari seluruh proses penelitian sejarah, di mana data yang telah dikumpulkan, diverifikasi, dan diinterpretasikan disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis, kronologis, dan analitis.²³ Menurut Kuntowijoyo, historiografi bukan hanya sekadar menulis kronologi peristiwa, melainkan menyusun interpretasi yang mampu menjelaskan dinamika perubahan sosial yang terjadi di masa lampau.²⁴ Dengan demikian, penulisan sejarah harus memiliki struktur logis, bahasa ilmiah yang jelas, serta argumentasi yang didukung oleh bukti.²⁵

Dalam penelitian ini, tahap historiografi dilakukan dengan menulis secara kronologis tentang sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiah Amiruddin, perkembangan kelembagaan, perubahan status pendidikan, serta proses perkembangan dalam pendidikan Islam pada periode 1968–1985. Penulisan ini diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara tradisi pesantren dan transformasi madrasah dalam konteks perubahan sosial di masyarakat pedesaan Jawa pada masa Orde Baru.

Adapun batasan masalah guna membatasi penelitian Madrasah Ibtidaiah Amiruddin Mojokerto: Sejarah Perkembangan Dan Pembelajaran 1968-1985 agar

²³ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, hlm. 110.

²⁴ *Ibid*, hlm. 111.

²⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 29.

tetap berjalan sesuai dengan jalur penelitian. Batasan masalah dari aspek spasial berkenaan dengan tempat yang diteliti yakni Madrasah Ibtidaiah Amiruddin yang bertempat di Dusun Blendren Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Batasan temporal dimulai pada berdirinya lembaga pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiah Amiruddin pada tahun 1968 yang disebabkan perlunya lembaga yang menaungi kegiatan pembelajaran agar lebih terstruktur dan sistematis. Adapun tahun 1985 menjadi akhir batasan temporal, karena perkembangan dalam pembangunan Madrasah Ibtidaiah Amiruddin dan penerapan mata pelajaran pesantren yang sudah dihapus dan digantikan dengan kurikulum yang disesuaikan oleh departemen agama. Seperti, Aqidah Akhlaq, Qur'an Hadist, Fiqh, dan Bahasa Arab.